

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal memiliki kekayaan dan potensi alam yang melimpah. Potensi alam tersebut hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan nikel, hingga hasil kekayaan hayati berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta kehutanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan ribuan pulau yang menawarkan panorama luar biasa, mulai dari pantai tropis yang memukau, pegunungan yang megah, hingga kekayaan ekosistem laut yang menakjubkan. Semua potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan pariwisata secara berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, diperlukan sistem pengelolaan yang baik, terencana, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada aspek promosi destinasi wisata, tetapi juga mencakup berbagai sektor pendukung seperti pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk akses transportasi, fasilitas umum dan beberapa fasilitas terkait. Selain itu, pengelolaan yang baik juga harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Sumber daya manusia di sekitar kawasan wisata juga memegang peranan penting, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka mampu berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah bahkan sektor swasta yang membantu sering kali kita kenal dengan istilah *collaborative governance*. Pada dasarnya istilah *collaborative governance* mengacu pada tata kelola yang melibatkan sektor lain dalam mengelola suatu sumber daya, baik publik, privat ataupun masyarakat sipil dalam mengelola suatu kebijakan publik¹. Pendekatan ini hadir karena kesadaran kapasitas lembaga sering kali terbatas dan tidak akan maksimal jika mengelola sumber daya secara mandiri. Sehingga keterlibatan aktif antar sektor dan pihak- pihak yang memiliki kepentingan dalam sektor ini bisa dimaksimalkan dan diharapkan akan berdampak terhadap sektor tersebut.

Selain menjadi sarana rekreasi dan hiburan, sektor pariwisata berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah wisata. Pembangunan sektor pariwisata berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) daerah, pengembangan infrastruktur². Pada ekonomi, pariwisata berperan melalui penciptaan lapangan kerja, peluang wirausaha, serta peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga. Selain itu sektor ini mampu menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, maupun devisa dari wisatawan mancanegara. Pariwisata turut mendorong pengembangan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, seperti pembangunan jalan, transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas perhotelan, pusat kuliner, hingga sarana kebudayaan.

Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi melalui bertambahnya pendapatan dan peluang kerja, tetapi juga memberi manfaat sosial berupa perluasan interaksi serta penguatan solidaritas masyarakat. Selain itu, pariwisata berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan memperkenalkan kearifan lokal ke

¹ Chris Ansell dan Alison Gash.2008. Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktik. *jurnal of Public Administration Research and Theory*.4.18

² Nabilla, F. 2024. Systematic Literatur Review: Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JABIPREUNER*, 1(2), 19-31.

masyarakat luas. Dengan demikian, pariwisata menjadi sektor strategis yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sosial dan budaya daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan berbagai aktor nonpemerintah di tingkat nagari, seperti kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, maupun lembaga adat, agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Dampak ganda (*multiplier effect*) dari pembangunan sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke dimensi sosial dan budaya. Dari sisi kesejahteraan, pariwisata mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bertambahnya pendapatan, perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dari aspek pemerataan pembangunan, pertumbuhan pariwisata mendorong pengembangan wilayah, termasuk daerah terpencil yang memiliki potensi wisata namun sebelumnya kurang mendapat perhatian, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dari perspektif budaya, pariwisata berperan penting dalam pemeliharaan serta revitalisasi nilai-nilai budaya lokal, karena masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya warisan budaya sebagai aset berharga yang dapat meningkatkan identitas daerah. Hal ini mampu menjadikan pariwisata sebagai instrumen strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan dilakukannya *collaborative governance*, maka kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat bisa diwujudkan dengan maksimal. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa pemerintah tidak selalu mampu menjalankan seluruh peran dan fungsinya secara maksimal akibat keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan, maupun jangkauan kerja. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktor non-pemerintah sebagai mitra strategis dalam mendukung serta melengkapi peran pemerintah. Aktor tersebut dapat berasal dari organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, maupun kelompok komunitas lokal. Keterlibatan

berbagai pihak di luar pemerintah tidak hanya sekadar memberikan dukungan, melainkan juga mengambil bagian dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Salah satu daerah yang menerapkan pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata adalah Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini, yang berjarak sekitar dua jam dari perbatasan provinsi, dikenal sebagai “*negeri sejuta pesona*” julukan yang mencerminkan kekayaan alamnya berupa pantai, laut, pulau-pulau kecil, serta kawasan pegunungan. Hal ini didasarkan pada penghargaan yang diterima oleh Nagari Amping Parak sebagai Juara III Nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, yang dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri³.

Penelitian terdahulu juga menunjang hal ini. Penelitian- penelitian yang berhasil dilakukan oleh Madya Putra Yaumil Ahad dan Adhityo Nugraha Barsei (2023)⁴ menegaskan bahwa kolaborasi antara perangkat desa dan kelompok sadar wisata dinilai berperan penting dalam inovasi program wisata, hal serupa dikemukakan juga oleh Aco Nata Saputra, dkk (2023)⁵, yang menyatakan bahwa komunitas lokal berperan penting dalam meningkatkan kepemilikan terhadap aset wisata, Gina Setyanintyas, dkk(2024)⁶, Anak Agung Diah Savitri, dkk (2024)⁷, juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan serta pendanaan berbasis partisipatif. Penelitian lain yang dilakukan Sirajul Fuad Zis (2024)⁸, menyatakan pentingnya penguatan kelembagaan dalam mengelola pariwisata, sedangkan Maria Monika

³<https://padang.pikiran-rakyat.com/travel/pr-2258788734/ampiing-parak-juara-iii-nasional-desa-wisata-perjuangan-kebanggaan-dan-masa-depan> diakses 3 September 2025, pukul 16.00 WIB

⁴ Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52-74.

⁵ Mandar, P. D. K. P. Collaborative Governance dalam Pengelolaan.

⁶ Setyanintyas, G., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Grobogan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 762-775

⁷ Savitri, A. A. D., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui collaborative governance di Desa Wisata Penglipuran. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5).

⁸ Zis, S. F., Yonariza, Y., Tanjung, H. B., & Arief, E. (2024). Komunikasi Kelompok Sadar Pariwisata Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 98-110.

Ranti (2025)⁹ menjelaskan tentang peran UMKM dan swasta dalam pengembangan ekonomi kreatif desa wisata.

Penelitian Erica Indah Maulia, dkk (2023)¹⁰, Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, dkk (2024)¹¹ menjelaskan bahwa aspek digitalisasi wisata berbasis komunitas mampu menjadi kunci dalam keberlanjutan, temuan Adinda Moreta dan Zulfa Harirah MS (2023)¹², Nisa Ul Husna, dkk (2025)¹³ menampilkan hal serupa bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat dan Sri Afnitawati Rizky, dkk (2024)¹⁴ menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata merupakan hasil dari integrasi visi dan kerja sama semua pemangku kepentingan.

Penelitian- penelitian yang sudah dilakukan (2020–2025), kajian mengenai *collaborative governance* di sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sebagian besar penelitian berfokus pada pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, seperti Desa Wisata Nglanggeran, Pentingsari, Kamasan, Nagari Tuo, dan Kampuang Sarugo. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata. Pendekatan yang digunakan mayoritas berupa studi kasus kualitatif deskriptif, dengan temuan yang relatif serupa bahwa

⁹ RANTI, M. (2025). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Pentingsari Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").

¹⁰ Maulia, E. I. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis dampak digitalisasi desa wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 404-418.

¹¹ Milandika, K. B. R. I., Yudartha, I. P. D., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5), 23-36.

¹² Moreta, A., & Harirah, Z. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*, 106-112.

¹³ Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9(1).

¹⁴ Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi, A. Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(1), 12-29.

keberhasilan tata kelola pariwisata dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antaraktor, partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta penguatan modal sosial dan budaya lokal.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada bagaimana kolaborasi terbentuk dan berfungsi dalam pengelolaan pariwisata secara umum, tanpa mengaitkannya dengan isu-isu ekologis, konservasi lingkungan, serta keberlanjutan kawasan wisata. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu pada integrasi konseptual dan kontekstual antara *collaborative governance* dan praktik ekowisata berbasis konservasi serta pengurangan risiko bencana (PRB). Secara konseptual, penelitian ini berupaya melokalisasi teori *collaborative governance regime* dengan menekankan nilai-nilai sosial khas masyarakat Indonesia seperti *musyawarah*, *gotong royong*, dan *partisipasi komunitas* sebagai dasar terbentuknya kolaborasi yang efektif. Secara kontekstual, penelitian ini menempatkan fokus pada Nagari Amping Parak, wilayah yang menunjukkan bentuk kolaborasi yang tumbuh secara *bottom-up* melalui inisiatif masyarakat dalam kegiatan konservasi penyu dan pengelolaan kawasan pesisir. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat muncul secara organik tanpa bergantung pada kebijakan formal pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas konsep ekowisata berbasis konservasi dengan memasukkan dimensi pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai salah satu pilar utama keberlanjutan. Pendekatan ini memposisikan ekowisata tidak hanya sebagai sarana pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi adaptif terhadap ancaman ekologis di wilayah pesisir. Oleh karena itu, secara akademik penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian *collaborative governance* yang belum banyak mengaitkan aspek kolaborasi lintas aktor dengan konservasi lingkungan dan mitigasi bencana. Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena dapat menjadi model tata kelola

kolaboratif yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai lokal, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan sosial dan ekologis masyarakat pesisir di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Posisinya yang strategis dari Sabang hingga Merauke dan 17.507 pulau yang dimiliki serta total luas wilayah perairan yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km.¹ Hal itu menjadikan tantangan tersendiri dalam mengelola potensi keanekaragaman hayati laut yang terancam punah dan dilindungi, tak hanya itu berbagai ancaman alam pada kawasan konservasi seperti bencana alam, abrasi, tsunami, penurunan kondisi lingkungan, penyimpangan perilaku sosial berupa pemanfaatan ilegal keanekaragaman hayati laut terancam punah khususnya penyu dan turunannya (telur) serta keterbatasan sumberdaya manusia (SDM), anggaran, dan daya jangkau pemerintah juga membutuhkan solusi terbaik.¹⁵

Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan. Daerah ini dikenal luas karena keindahan alamnya yang beragam, mulai dari panorama pantai dengan pasir putih yang memanjang, gugusan pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga kawasan perbukitan dan hutan tropis yang masih asri. Bentuk pariwisata Pesisir Selatan yang banyak dikenal di antaranya adalah Pantai Carocok, Kawasan Wisata Mandeh, Rumah Gadang Bundo Kandang Rubiah, serta Eko-Wisata Nagari Amping Parak yang belakangan berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan. Tingginya minat kunjungan wisatawan dapat dibuktikan melalui data statistik pariwisata daerah, yang

¹⁵ Novianti, Hesti (2025) *Community Governance Dalam Pembangunan Ekowisata Nagari Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan*. S1 thesis, Universitas Andalas.

menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan dari awal tahun 2025, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data kunjungan Wisatawan 2025 di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ kota	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Kab. Kepulauan Mentawai	4602	7054	6262	5493	7094
2	Kab. Pesisir Selatan	87715	117718	96078	102485	105201
3	Kab. Solok	117549	169253	125506	134189	136087
4	Kab. Sijunjung	52766	94217	60194	68191	66413
5	Kab. Tanah Datar	91660	129001	102501	111213	111334
6	Kab. Padang Pariaman	107102	141374	113662	118390	119540
7	Kab. Agam	174081	239204	186065	199768	202403
8	Kab. Lima Puluh Kota	91084	121314	99670	106507	108361
9	Kab. Pasaman	50114	70595	50923	56524	60940
10	Kab. Solok Selatan	33919	61259	37724	42598	43236
11	Kab. Dharmasraya	71106	131731	85607	90660	89662
12	Kab. Pasaman Barat	79632	132782	87885	95875	101220
13	Kota Padang	330762	585032	357170	448042	380439
14	Kota Solok	41928	59866	45838	49550	46623
15	Kota Sawahlunto	21854	33279	24368	26456	25659
16	Kota Padang Panjang	32078	45706	35254	40100	36917
17	Kota Bukittinggi	67871	96923	73135	83654	77523
18	Kota Payakumbuh	60023	89106	68022	76382	73392
19	Kota Pariaman	34439	46409	37556	40180	37327
Provinsi Sumatera Barat		1550285	2371823	1693420	1896257	1829371

Sumber: data BPS Pesisir Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 tentang data kunjungan wisatawan tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren kunjungan yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pada bulan Januari, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 96.733 orang dan terus berfluktuasi hingga mencapai angka tertinggi pada bulan April dengan 117.718 kunjungan. Setelah itu, angka kunjungan sempat menurun pada bulan Mei (96.078 kunjungan), namun kembali meningkat di bulan Juni (102.485 kunjungan) dan Juli (105.201 kunjungan). Jika dibandingkan dengan daerah lain, Pesisir Selatan berada pada kategori tinggi dalam jumlah kunjungan wisatawan, meskipun masih di bawah Kota Padang dan Kabupaten Agam yang menjadi pusat kunjungan utama di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

memiliki potensi strategis sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pelestarian budaya lokal.

Salah satu wisata yang paling potensial dikembangkan di Pesisir Selatan adalah Ekowisata Nagari Amping Parak. Nagari Amping Parak terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat serta kekayaan hayati yang melimpah. Hal inilah yang mendorong inisiatif beberapa pemuda setempat untuk menjaga ekologi alam kampung mereka, termasuk populasi penyu yang menjadi salah satu daya tarik utama kawasan tersebut. Ekowisata diperkenalkan oleh *the international ecotourism society*, menyebutkan bahwa ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat¹⁶.

Potensi Ekowisata Nagari Amping Parak juga didukung oleh tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan yang menunjukkan bahwa Kawasan Amping Parak merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 66.171 orang. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 16.764 orang pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 9.886 orang pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kunjungan meningkat menjadi 24.224 orang. Data jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Amping Parak dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Amping Parak

Tahun	Jumlah Kunjungan (Orang)
2022	66.171
2023	16.764

¹⁶ Sya Ahman, Hotimah Oot, 2021, Manajemen Ekowisata, UNJ Press, Jakarta Timur, hal 3-4

2024	9.886
2025	24.224

Sumber: dinas Pariwisata dan Olahraga Pesisir Selatan.

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Amping Parak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan destinasi wisata Amping Parak yang memerlukan perhatian dalam aspek pengelolaan dan pengembangan destinasi guna menjaga keberlanjutan wisata serta meningkatkan daya tarik kawasan bagi wisatawan. Meskipun demikian, perkembangan Ekowisata Nagari Amping Parak hingga saat ini menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, kelompok pengelola wisata, maupun pihak swasta yang berperan dalam mendukung pengembangan ekowisata di kawasan tersebut.

Sebagai langkah konkret, sejumlah pemuda dan masyarakat setempat berinisiatif membentuk kelompok yang diberi nama Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL). Kelompok ini hadir sebagai wadah kolaboratif yang berfokus pada aksi nyata untuk menjaga kelangsungan alam dan ekosistem pesisir. Melalui berbagai kegiatan seperti penanaman mangrove, edukasi lingkungan, serta pengelolaan wisata berbasis konservasi, LPPL tidak hanya berperan dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat nagari. LPPL dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.1 Pengurus Laskar *Turtle Camp* (LTC)/ LPPL

Sumber: www.mongabay.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 merupakan pengurus Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Nagari Amping Parak, sebuah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Konservasi penyu yang dilakukan di Amping Parak diharapkan mampu menjadi salah satu cara dalam membantu pelestarian penyu. Bahkan 3 penyu langka kembali bertelur di kawasan pantai sejak beberapa bulan terakhir, hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan wawancara yang dilakukan oleh media fakta sumbar kepada Ketua Laskar *Turtle Camp* (LTC) atau yang sebelumnya bernama LPPL, Haridman, sebagai berikut:¹⁷

”Saat ini sudah terdapat beberapa jenis penyu langka yang mendarat untuk bertelur. Diantaranya, penyu jenis lekang, sisik dan penyu hijau, Kami menyaksikan penyu-penyu langka itu telah kembali bertelur di kawasan pantai ini sejak beberapa bulan terakhir”¹⁸.

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan keberhasilan upaya konservasi penyu yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Amping Parak. Pernyataan itu menunjukkan bahwa lingkungan pesisir di kawasan tersebut telah kembali menjadi habitat yang aman dan layak bagi penyu langka untuk bertelur, seperti penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Ketiganya termasuk spesies yang dilindungi karena populasinya terus menurun di alam liar. Fenomena kembalinya penyu-penyu langka ini menandakan bahwa ekosistem pesisir mulai pulih dan

¹⁷<https://faktasumbar.id/3-jenis-penyu-langka-datangi-kawasan-konservasi-amping-parak/>.

Oktober 2025, pukul 22.16 WIB

terjaga keseimbangannya berkat berbagai kegiatan konservasi. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator keberhasilan program ekowisata berbasis konservasi yang dijalankan di Amping Parak, karena keberadaan penyu dapat menarik wisatawan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Salah satu kegiatan konservasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.2 Berikut:



Gambar 1.2 Konservasi Penyu Amping Parak

Sumber: Kanal 24.co.id

Gambar 1.2 memperlihatkan kegiatan konservasi penyu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan pemuda di Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kegiatan ini, para peserta terlihat melepaskan *tukik* (anak penyu) ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka yang menjadi ikon ekowisata pesisir tersebut. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sebagai salah satu aksi nyata dalam konservasi. Melalui kegiatan konservasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran ekologis dan bisa memperkuat *branding* nagari sebagai salah satu nagari ekowisata berbasis konservasi. Ekowisata Amping Parak juga dikenal sebagai salah satu desa ekowisata di Indonesia yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Desa Ekowisata Berbasis PRB

Sumber: Jadesta (Kemenparekraf), Profil Desa Wisata Amping Parak

Berdasarkan gambar 1.3 menampilkan tulisan tersebut menjadi simbol keberhasilan nagari dalam mengembangkan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada keindahan alam dan pelestarian lingkungan tetapi juga dalam mitigasi bencana. Konsep ekowisata berbasis PRB masih sangat jarang diterapkan dalam beberapa desa ekowisata di beberapa daerah¹⁹. Konsep ekowisata berbasis PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang diterapkan di Amping Parak menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mereka tidak sekadar mengelola wisata, tetapi juga melindungi kawasan pantai dari ancaman abrasi, menjaga kelestarian hutan mangrove, serta melestarikan habitat penyu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain berdampak pada lingkungan, ekowisata berbasis PRB di nagari Amping Parak juga berkontribusi dalam beberapa aspek.

Nagari Amping Parak berhasil membuktikan kesuksesannya dalam mengelola pariwisata melalui raihan penghargaan bergengsi tingkat nasional, yakni Juara 3 Desa Adiwiyata Nasional. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:

¹⁹ Puspitasari, D., & Mulyani, S. (2022). *Implementasi Konsep Pengurangan Risiko Bencana dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 20(3), 221–230.



Gambar 1.4 Penghargaan juara III Desa Wisata Indonesia 2024

Sumber: sumber.antaranews.com

Berdasarkan Gambar 1.4 yang memperlihatkan capaian Juara III Desa Wisata Indonesia Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi yang kuat antaraktor pembangunan dalam mengelola dan mengembangkan Nagari Amping Parak. Sinergi ini menunjukkan adanya pola kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak masyarakat lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), aktor negara (pemerintah nagari dan lembaga pendukung), serta sektor swasta. Masyarakat menjadi aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata. Mereka terlibat langsung sebagai pengelola destinasi, pemandu wisata, penjaga kebersihan lingkungan, serta pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal. Peran masyarakat juga terlihat melalui partisipasi aktif dalam menjaga keaslian budaya, melestarikan adat istiadat, serta menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam aktivitas wisata sehari-hari.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mengorganisir kegiatan wisata di tingkat nagari. Melalui Pokdarwis, masyarakat mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen destinasi, pengelolaan sampah, serta pelayanan wisata yang berkelanjutan. Pokdarwis juga menjadi wadah komunikasi antara warga

dengan pihak pemerintah nagari agar setiap kebijakan dan program pembangunan wisata dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah nagari berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam menjaga koordinasi antar-pihak. Pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan, bantuan sarana dasar, serta membuka ruang partisipasi publik agar seluruh unsur masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata. Sinergi antara pemerintah nagari, Pokdarwis, dan masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan Nagari Amping Parak dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya.

Dalam pengembangan wisata Amping Parak, Pemerintah Nagari Amping Parak berperan sebagai aktor pemerintah lokal yang penting dalam kerangka collaborative governance. Peran nagari tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong terjalinnya kolaborasi antara masyarakat, kelembagaan lokal, dan pemangku kepentingan eksternal. Pemerintah nagari memberikan dukungan melalui penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Bank Nagari dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, nagari mendukung penguatan kelembagaan lokal, khususnya Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Pulau Penyu Amping Parak, yang berperan dalam pengelolaan ekowisata dan konservasi penyu.

Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Nagari terlibat dalam penyusunan arah pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan upaya mitigasi bencana, mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana. Pemerintah nagari juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, yang tidak hanya mendukung kegiatan konservasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, Pemerintah Nagari menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam upaya promosi wisata Amping Parak di tingkat yang lebih luas. Dukungan anggaran yang diperoleh melalui

sinergi dengan berbagai pihak tersebut turut memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Nagari Amping Parak mencerminkan domain pemerintah dalam *collaborative governance* yang berkontribusi terhadap perkembangan wisata Amping Parak secara berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Amping Parak juga tidak terlepas dari dukungan pihak ketiga, yaitu PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat. Perusahaan ini turut membantu melalui dukungan keuangan serta penyelenggaraan berbagai pelatihan bagi masyarakat agar mereka memahami cara mengelola pariwisata berbasis konservasi. Melalui dukungan tersebut, PT PLN (Persero) melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk komitmen dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan²⁰. Program CSR ini tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. CSR yang dijalankan PT- PLN (Persero) menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan.

Dalam rentang waktu 2017–2021, PT PLN (Persero) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp703.995.159 yang dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung pariwisata di Nagari Amping Parak. Bantuan tersebut meliputi pembangunan gapura sebagai identitas kawasan wisata, musholla sebagai sarana ibadah bagi pengunjung dan masyarakat, jembatan penghubung antarlokasi wisata, posko sekretariat bagi pengelola wisata, fasilitas

²⁰ Rinaldi Eka Putra, Andri Rusta, & Hairunnas, *Laporan Akhir: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Perhitungan Social Return on Investment (SROI) pada Program Ekowisata Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat* (Padang: PT PLN (Persero) UIW Sumatera Barat bekerja sama dengan LPPM Universitas Andalas, 2021).

bermain anak, toilet umum, pondok diskusi, serta penyediaan sepeda motor operasional dan pengembangan situs web promosi wisata²¹. Seluruh bantuan ini dirancang untuk mendukung terciptanya destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga ramah terhadap kebutuhan pengunjung dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Rincian bantuan dana yang diberikan beserta aktivitas dana tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.3 data aktivitas Dana PT PLN (Persero)

No	Tahun	Aktivitas Dana	Anggaran CSR
1	2017	Pembuatan gapura, jembatan, mushollah, motor sampah dan posko kesektariat	Rp. 236.000.000
2	2018	Fasilitas permainan anak	Rp. 126.955.100
3	2019	Gedung mini amphitheatre dan sarana pendukung, toilet, mesin perahu listrik, website dan perlengkapannya, pondok diskusi dan media interpretasi.	Rp. 227.040.059
4	2020	Pembuatan jembatan <i>tracking mangrove</i>	Rp. 47.000.000
5	2021	Pembelian sepeda motor dan perahu kano	Rp. 67.000.000
TOTAL KESELURUHAN			Rp703.995.159

Sumber: Laporan Akhir SROI & IKM pada program ekowisata Amping Parak

Pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat menjadi salah satu pihak yang berpengaruh dalam pengembangan ekowisata di Nagari Amping Parak selain masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah nagari sebagai stakeholder utama. Melalui dukungan dana CSR dan kegiatan pelatihan, PLN berperan penting dalam menyediakan infrastruktur, sarana pendukung wisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi berbasis konservasi. Keterlibatan PLN menunjukkan adanya kolaborasi multipihak yang saling melengkapi, di mana perusahaan berkontribusi pada aspek pendanaan dan penguatan kelembagaan, sementara masyarakat dan Pokdarwis menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan wisata di lapangan.

²¹ Ibid.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)²². Setiap aktivitas pariwisata secara langsung menimbulkan penerimaan berupa pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, serta retribusi tiket masuk objek wisata. Pajak dan retribusi tersebut menjadi salah satu sumber utama PAD yang berkelanjutan. Selain itu, pariwisata memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian daerah. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya membayar tiket masuk, tetapi juga melakukan berbagai aktivitas lain seperti berbelanja, menginap di penginapan, dan menggunakan jasa transportasi. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran uang yang luas di masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.

Pariwisata juga mendorong tumbuhnya investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner, kerajinan, serta transportasi lokal. Pertumbuhan UMKM ini memberikan tambahan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Selanjutnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya memperbesar potensi pajak daerah. Lebih jauh, meningkatnya arus wisatawan turut memperkuat promosi daerah dan membangun citra positif destinasi wisata. Sehingga akan lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah dan akan terjadi transaksi berulang di daerah tersebut, sehingga dapat membantu masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian maka penulis berasumsi bahwa kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan Desa Wisata Amping Parak telah terbentuk secara efektif dan bisa dikatakan berhasil serta berperan penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata tersebut. Asumsi ini didasarkan pada bukti empiris berupa praktik kolaboratif nyata di lapangan yang memperlihatkan keterlibatan aktif setiap aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

²² Siregar, R. A. (2024). *Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

evaluasi kegiatan pariwisata. Berdasarkan teori *Collaborative Governance Regime*, penulis berasumsi bahwa keberhasilan pengelolaan Desa Wisata Amping Parak merupakan hasil dari terbentuknya suatu rezim pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance regime*) yang efektif. Kolaborasi ini muncul karena adanya dorongan bersama dari para aktor yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan desa wisata, berkembang melalui tahapan kolaborasi yang sistematis, serta diperkuat oleh mekanisme evaluasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, memperlihatkan bahwa perkembangan pariwisata di Pesisir Selatan tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga membawa efek berantai (*multiplier effect*) yang memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini juga berlaku terhadap pariwisata yang ada di Nagari Amping Parak. Nagari ini dikenal dengan destinasi ekowisata yang mengusung konsep *Pengurangan Risiko Bencana (PRB)* dan telah mendapat pengakuan nasional dengan meraih Juara III Desa Wisata Indonesia Tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan adanya pengelolaan wisata yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut "Bagaimana dinamika *collaborative governance* antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam pengelolaan ekowisata berbasis PRB di Nagari Amping Parak?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika *collaborative governance* antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam pengelolaan ekowisata berbasis PRB di Nagari Amping Parak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat tentang dinamika *collaborative governance* yang terjadi di Nagari Amping parak serta dapat menjadi bahan tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi pengelolaan pariwisata berbasis *Pengurangan Risiko Bencana (PRB)*, khususnya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, BPBD, dan masyarakat lokal.

